

Judul : Marak kasus KDRT, orang tua egois, anak jadi korban
Tanggal : Jumat, 09 Agustus 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Marak Kasus KDRT

Orang Tua Egois, Anak Jadi Korban

KETUA DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berisiko tinggi menjadikan anak sebagai korban. Diharapkan, ada program-program yang dapat mencegah terjadinya KDRT. "Kekerasan terhadap anak masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama. Harus ada upaya komprehensif untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan pada anak yang setiap harinya semakin banyak ditemukan," ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Kamis (8/8/2024).

Puan prihatin dengan semakin tingginya kasus kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua atau anggota keluarganya sendiri. Satu di antaranya, kasus kekerasan yang menimpa seorang balita berusia 1 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban meninggal dunia akibat dibanting oleh ibu kandungnya

pada pada Minggu (4/8/2024).

Selain itu, baru-baru ini, adapula seorang ayah kandung yang menyandera dan melilit anaknya yang masih berusia satu tahun hingga menyundut sang anak dengan rokok karena marah kepada istrinya. Menanggapi itu, Puan menegaskan kekerasan pada anak tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut tegas.

"Anak-anak ini tidak bersalah, mengapa harus menjadi korban keegoisan orang dewasa yang seharusnya melindungi mereka. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Stop kekerasan pada anak!" tegas ibu dua anak itu.

Sebagai informasi, kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua sendiri kerap terjadi di lingkungan keluarga berisiko. Keluarga berisiko merupakan situasi/kondisi keluarga yang dapat mengancam kesehatan keluarga karena keadaan fisik, mental,

maupun sosial ekonominya.

Adapun kedua kasus yang terjadi itu dinilai sebagai buntut dari ketidakstabilan emosi orang tua dalam menghadapi problematika rumah tangga. Negara dinilai memiliki peran untuk menjaga ketahanan keluarga. Sebab itu, kontribusi negara, melalui regulasi dan Kementerian/Lingkungan terkait, harus turun tangan mengatasi permasalahan ini.

"Ada banyak PR yang harus diselesaikan dalam menghadapi keluarga berisiko. Mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan mental masyarakat, pemerataan pembangunan, hingga keadilan untuk semua rakyat. Ini pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab bersama," ujar Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Dia bilang, ketahanan keluarga masyarakat Indonesia harus bisa tercapai meski tantangannya

cukup besar.

"Hal ini membutuhkan peran serta dari pemangku kebijakan. Kalau ketahanan keluarga tercapai, perlindungan terhadap anak pun juga terjamin," sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Puan, salah satu upaya yang harus segera dilakukan untuk mencegah KDRT dalam keluarga berisiko adalah dengan memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan serta pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Minimnya literasi sering kali menjadi sebab anak-anak tidak berdosa menjadi korban kekerasan dari orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dia mendukung adanya upaya pendampingan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maraknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak bah-

kan bayi akibat perilaku orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dengan melakukan pendampingan bagi keluarga berisiko diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan pada anak.

Puan menambahkan, Pemerintah perlu menyediakan layanan dukungan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk konseling psikologis dan layanan kesehatan. Meski tidak dapat mengadopsi sepenuhnya, layanan servis untuk kesejahteraan anak di beberapa negara maju bisa dijadikan contoh.

Lewat layanan tersebut, negara betul-betul menjamin keamanan dan keselamatan anak, termasuk dari orang tuanya sendiri.

"Dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, DPR, lembaga sosial, berbagai elemen bangsa dan masyarakat itu sendiri untuk mencegah kekerasan terhadap anak," imbuh Puan. ■ KAL